
**ANALISIS PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA**

Oleh
Jam'iyatuzzulfiyyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Email : zulehak29@gmail.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are innovations that can be used as a strong foundation for a country, especially Indonesia which is still at the level of a developing country, it is hoped that MSMEs can play an important role in the economy in Indonesia, looking at Indonesia's history of experiencing a monetary crisis in this Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) were able to survive and tended to increase at that time, while many large-scale businesses suffered losses and even went bankrupt. This study uses a descriptive qualitative approach, describing the data objectively. The formulation of the problem used in this study is how many companies / businesses and the extent of the spread of MSMEs in absorbing labor in Indonesia, and how the role of MSMEs in reducing the unemployment rate in Indonesia. The results of this study reveal that MSMEs have a dominant role in absorbing labor in Indonesia, from year to year the number of MSMEs has always increased significantly, their numbers are always above the number of large-scale businesses. In line with the increase in MSMEs, employment has increased significantly. So that MSMEs play an important role in reducing the unemployment rate in Indonesia.

Keywords: MSMEs & Labor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana masalah utama negara sedang berkembang ialah kelebihan jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Hal ini juga dialami oleh semua negara yang masuk kategori NSB (Negara Sedang Berkembang). Bagaimana melimpahnya penduduk di sebuah negara tidak menjadi beban pembangunan bagi negara melainkan dapat membantu dalam memberikan modal pembangunan suatu negara (Hafni & Rozali, n.d.). UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) merupakan sebuah inovasi yang dapat dijadikan fondasi kuat bagi sebuah negara, terutama Indonesia yang masih berada di tingkat negara sedang berkembang, banyaknya wirausahawan mempermudah pembangunan di Indonesia semakin baik, sehingga munculah kesejahteraan masyarakat yang merata. Berkaca pada sejarah yang sangat menggemparkan Indonesia pada tahun 1997-

1998, dimana saat itu terjadi krisis moneter yang menyebabkan perusahaan berskala besar mengalami kebangkrutan karena tidak dapat lagi memproduksi barang. Melemahnya rupiah terhadap dollar menyebabkan perekenomian Indonesia kalang kabut dan terpuruk. Hal ini bertolak belakang dengan usaha kecil menengah yang justru cenderung bertahan dan makin bertambah pada masa itu. UMKM dapat dijadikan perangsang perekenomian pada negara sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sejak saat itu untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah mengaggap UMKM sangat strategis dan potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha kecil diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau disebut dengan kegiatan ekonomi produktif dengan bertumpu pada kaki sendiri, artinya

pemilik dan pelaksana berasal dari perorangan atau badan usaha secara independent, tidak terikat dengan perusahaan usaha menengah dan usaha besar dan juga bukan anak cabang dan bagiannya. UMKM harus memuat kriteria sebagai berikut, untuk usaha kecil kekayaan bersih Rp.50 juta - Rp.500 juta dan hasil penjualan per tahun sebesar Rp.300-Rp.2,5 miliar, nominal tersebut belum memuat tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha mikro kekayaan bersih per tahun berjumlah Rp.50 juta - Rp.300 juta, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan sebesar Rp.500 juta - Rp.10 miliar per tahun dengan hasil usaha penjualan per tahun lebih dari Rp.2,5 miliar sampai Rp.50 miliar (Kuncoro & At, 2010).

Beberapa potensi UMKM yang patut diunggulkan daripada usaha skala besar yakni : (1) tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, (2) teknologi yang digunakan sederhana akan tetapi tidak menutup inovasi baru yang dapat mengembangkan produk menjadi lebih baik, (3) mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, karena UMKM cenderung tidak ada kualifikasi Pendidikan dan keahlian untuk calon tenaga kerja,, (4) pemilik dan pelaksana usaha berasal dari penduduk pribumi sehingga diharapkan mampu mengembangkan kemandirian masyarakat, (5) sumber daya yang digunakan berasal dari potensi local. Dengan beberapa potensi tersebut, pemerintah mulai menoleh dan memperhatikan sector UMKM untuk meningkatkan struktur ekonomi nasional. Diketahui UMKM telah memberikan banyak hal positif untuk perekonomian Indonesia, yaitu menyumbangkan 57- 60% kepada PDB (Produk Domestik Bruto), lalu kontribusi sebesar 97% untuk tingkat penyerapan tenaga kerja dari seluruh jumlah tenaga kerja di Indonesia. (Sarwono, 2015)

Tabel 1. Data jumlah usaha dan tenaga kerja industri mikro dan kecil menurut provinsi tahun 2015

No.	Provinsi	Usaha	Tenaga Kerja
1	Aceh	65.492	112.728
2	Sumatera Utara	99.022	168.272
3	Sumatera Barat	67.697	114.601
4	Riau	17.435	33.645
5	Jambi	24.169	41.790
6	Sumatera Selatan	49.346	79.542
7	Bengkulu	12.281	22.138
8	Lampung	80.505	157.646
9	Kep. Bangka Belitung	6.151	10.470
10	Kep. Riau	7.468	10.146
11	Dki Jakarta	34.994	64.180
12	Jawa Barat	480.240	833.706
13	Jawa Tengah	1.030.374	1.830.429
14	Di Yogyakarta	57.665	93.632
15	Jawa Timur	820.844	1.518.302
16	Banten	117.548	191.324
17	Bali	103.360	162.548
18	Nusa Tenggara Barat	94.291	156.660
19	Nusa Tenggara Timur	73.169	124.561
20	Kalimantan Barat	55.113	99.439
21	Kalimantan Tengah	12.599	21.392
22	Kalimantan Selatan	57.477	95.252
23	Kalimantan Timur	12.028	19.213
24	Kalimantan Utara	1.300	2.220
25	Sulawesi Utara	39.470	71.833

26	Sulawesi Tengah	22.396	40.946
27	Sulawesi Selatan	118.473	201.034
28	Sulawesi Tenggara	47.270	81.671
29	Gorontalo	13.216	22.726
30	Sulawesi Barat	11.874	20.319
31	Maluku	19.575	32.413
32	Maluku Utara	7.051	10.551
33	Papua Barat	1.523	2.623
34	Papua	7.457	16.442

(BPS, 2015)

Data diatas menunjukkan bahwa peran UMKM di Indonesia tampak baik, provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki sektor UMKM dan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Sebanyak 1.030.374 usaha mikro, kecil dan menengah berada di Jawa Tengah, serta sebanyak 1.830.429 tenaga kerja usaha mikro dan kecil berada di Jawa Tengah. Peringkat kedua dimiliki oleh provinsi Jawa Timur, sebanyak 820.844 perusahaan dan 1.518.302 tenaga kerja berada di Jawa Timur.

Pembahasan UMKM akan selalu berhubungan sumber daya manusia yang biasa disebut tenaga kerja. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Dongoran et al., 2016). Tenaga kerja disebut sebagai salah satu factor yang mempengaruhi hasil output sebuah negara. Semakin banyak tenaga kerja dengan kualitas yang baik akan memberikan kontribusi berupa hasil output yang berkualitas pula. Seperti yang dikatakan oleh Todaro (2000) dalam (Sari et al., 2016), beliau mengungkapkan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat apabila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang baik maka jumlah penduduk tersebut hanya akan menimbulkan masalah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut teori Lewis dalam (Nizar et al., 2013) perihal ketenagakerjaan yakni tenaga kerja yang berlimpah bukanlah sebuah masalah melainkan suatu kesempatan, adanya kelebihan tenaga kerja satu sektor akan memberikan peran pada pertumbuhan hasil produksi dan juga penyediaan. Sedangkan teori klasik Adam Smith mengartikan manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara berawal dari alokasi sumber daya manusia yang efektif (Priyono & Ismail, 2012). Beliau menekankan bahwa pembagian kerja perlu dilakukan agar terbentuk perbaikan pada proses produksi. Tenaga kerja pastinya berhubungan dengan permintaan, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua hal yaitu perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil. (Sumarsono, 2003)

Rendahnya skill atau kemampuan penduduk menyebabkan produktivitas sebuah negara menjadi rendah. Produktivitas adalah tingkat kemampuan pekerja dalam menghasilkan sebuah barang per tahun. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, sektor terbesar masih dikuasai oleh sektor pertanian. Sektor pertanian terkadang masih memiliki produktivitas yang rendah, hal ini disebabkan banyaknya petani yang masih menggunakan teknologi yang sederhana. Selain itu agar pembangunan ekonomi nasional semakin kuat maka dibutuhkan peningkatan kemampuan UMKM untuk menggunakan bahan produksi local sehingga tidak bergantung dengan bahan impor (Solikatur et al., 2018).

Pelatihan dan pembinaan tenaga kerja perlu dilakukan agar produk hasil buatan dalam negeri tidak kalah saing dengan produk dari negara asing. Karena, untuk mengembangkan UMKM tentu banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM Indonesia, yaitu kurangnya kemampuan, keahlian, kreativitas, sumber daya manusia dan kurangnya pemasaran. Hal tersebut menyebabkan pengusaha kecil tidak dapat berkembang dengan baik. Dengan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui peran UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Seberapa banyak perusahaan/usaha dan luas penyebaran UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. (2) Bagaimana peran UMKM dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Singkat pengertian dari penelitian deskriptif yakni penelitian yang menjelaskan sebuah keadaan serta menyelesaikan masalah berdasarkan data baik data primer maupun data sekunder, selain menjelaskan sebuah data, deskriptif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang isinya menginterpretasi dan menganalisis data (Narbuko & Achmadi, 2007). Selain itu metode ini juga mempunyai kegunaan untuk menjelaskan suatu persoalan atau fenomena yang sedang terjadi (Hasan & Iqbal, 2009). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik). Peneliti melakukan penelitian ini selama dua bulan, yaitu bulan Oktober dan November 2020. Data penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu data jumlah tenaga kerja dan perusahaan industry mikro dan kecil menurut provinsi yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan data hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, dimana usaha mikro kecil pada saat itu cenderung bertahan dan kian bertambah, Pemerintah mulai melirik dan berfokus untuk mengembangkan usaha

mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi nasional dapat dilihat dari 5 sisi: (Kementrian Koperasi UMKM, 2005)

1. Di berbagai sektor kedudukan UMKM harus berada di tingkat paling atas, dengan kata lain harus mengungguli diantara sektor lain.
2. UMKM harus menjadi wadah penyerapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia.
3. Mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
4. Terus berinovasi sebagai sektor yang menciptakan pasar baru
5. UMKM harus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perdagangan Internasional berupa ekspor.

Tabel 2. Jumlah usaha/perusahaan menurut kategori lapangan usaha dan skala usaha tahun 2016

Lapangan usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Pertambangan dan penggalian	170.150	2.532	172.682	0,65
Industri Pengolahan	4.373.821	42.468	4.416.289	16,53
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30.639	3.294	33.933	0,13
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	92.391	2.439	94.830	0,36
Konstruksi	227.564	30.718	258.282	0,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.151.822	180.839	12.332.661	46,17
Pengangkutan dan pergudangan	1.302.162	32.123	1.334.285	5,00
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.445.519	20.703	4.466.222	16,72
Informasi dan Komunikasi	630.448	15.250	645.698	2,42
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	94.205	36.200	130.405	0,58
Real Estat	386.795	7.483	394.278	1,48
Jasa Perusahaan	358.178	27.291	385.469	1,44
Pendidikan	607.263	12.664	619.927	2,32
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	239.236	4.880	244.116	0,91
Jasa Lainnya	1.153.436	8.688	1.162.124	4,35
Jumlah	26.263.649	447.352	26.711.001	100,00
	(58,33)	(1,67)	(100,00)	

(Dwitjahyono, 2017)

BPS telah melakukan sensus ekonomi di tahun 2016, hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 26,71 juta perusahaan/usaha mendaftarkan diri ketika kegiatan sensus ekonomi dilakukan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sensus ekonomi pada tahun 2006. Pada tahun 2006 perusahaan/usaha terdaftar hanya 22,73 juta, hal ini berarti pada tahun 2016 terdapat

peningkatan sebesar 17,51%. Dilihat dari data diatas usaha mikro kecil (UMK) tampak mengungguli usaha menengah besar (UMB) dari semua lapangan usaha. UMK banyak bergerak di bidang industry pengelolaan dengan jumlah 4,37 juta perusahaan/usaha, lapangan usaha ini mengungguli berbagai lapangan usaha pada kategori UMK. Selanjutnya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan jumlah 4,44 juta perusahaan/usaha. Dari hasil data diatas, dapat kita ketahui peran UMKM dalam menyerap pekerja sangat efektif, dilihat dari jumlah usaha kategori UMK lebih banyak jumlahnya daripada kategori UMB.

Tabel 3. Data jumlah usaha/perusahaan menurut tingkatan usaha dan pulau tahun 2016

Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Sumatera	4.497.457	74.276	4.571.733	18,61
Jawa	15.931.889	291.697	16.223.586	60,74
Bali dan Nusa Tenggara	1.495.526	22.088	1.517.614	5,63
Kalimantan	1.352.324	26.645	1.378.969	5,16
Sulawesi	2.334.579	23.110	2.357.689	8,09
Maluku dan Papua	451.474	7.516	458.990	1,72
Jumlah	26.263.649	447.352	26.711.001	100,00
	(98,33)	(1,67)	(100,00)	

(Dwitjahyono, 2017)

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa pulau jawa merupakan pulau yang memiliki penyebaran UMKM terbanyak di Indonesia, sebanyak 15,93 juta perusahaan/usaha skala UMK berada di pulau jawa. Posisi kedua dimenangkan oleh pulau Sumatera, sebanyak 4,89 juta perusahaan/usaha berskala UMK tersebar di pulau tersebut. Lalu disusul oleh pulau Sulawesi dengan jumlah perusahaan 2,13 juta. Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,49 juta perusahaan/usaha. Pulau Kalimantan 1,35 juta dan terakhir pulau Maluku dan Papua hanya 451 perusahaan/usaha berskala UMK berdiri disana. Jawa merupakan pulau terpadat penduduk diantara pulau-pulau yang lain. Pusat ekonomi, pendidikan dan pemerintah berada di Pulau Jawa sehingga sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk tinggal di Pulau Jawa, hal inilah yang menyebabkan persebaran UMKM di Indonesia didominasi oleh Pulau Jawa.

1. UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia.

Indonesia saat ini berada di status *upper middle income country* yang artinya negara berpenghasilan menengah ke atas. Tentunya ini merupakan kabar baik untuk Indonesia, selain itu Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi di tahun-tahun mendatang. Bonus demografi adalah lebih banyaknya usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun), bonus demografi merupakan kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan tenaga kerja semaksimal mungkin, akan tetapi apabila bonus demografi tidak dipersiapkan dari sekarang maka akan menjadi bencana bagi Indonesia, yakni tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Apabila kita membahas ketenagakerjaan, tentunya yang sering dilihat adalah tingkat pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, pengangguran disebabkan karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang signifikan dapat dilihat dari tahun ke tahun yang menunjukkan ke arah positif. Pada tahun 2013 terdapat 3,18 juta UMKM, tahun 2014 meningkat menjadi 3,50 juta serta tahun 2015 mengalami peningkatan lagi menjadi 3,66 juta UMKM.

Tabel 4. Data jumlah tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha dan skala usaha tahun 2016

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Pertambangan dan pengalihan	532.109	403.844	935.953	1,33
Industri Pengolahan	9.351.703	6.648.202	15.999.905	22,75
Perdagangan, Akomodasi, dan Jasa/Ar.Fasilitas/Utara Datas	61.466	135.076	196.542	0,28
Pengalihan Air, Pengalihan Air Limbah, Pengalihan dan Data Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	108.132	79.833	248.185	0,35
Konstruksi	2.041.813	1.790.619	3.832.432	5,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20.009.990	2.359.409	22.369.399	31,81
Persewaan dan persewaan	1.740.528	727.717	2.468.245	3,51
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman	7.804.667	612.937	8.417.604	11,97
Informasi dan Komunikasi	938.714	247.338	1.186.052	1,69
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	590.607	1.170.489	1.720.556	2,45
Radi Listrik	393.879	163.816	557.695	0,78
Jasa Persewaan	935.307	815.973	1.751.280	2,40
Reproduksi	3.787.702	654.439	4.442.141	6,16
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	605.670	652.413	1.258.083	1,73
Jasa Lainnya	2.222.173	214.985	2.437.158	3,47
Jumlah	53.641.524	16.678.942	70.320.466	100,00
	(76,28)	(23,72)	(100,00)	

(Dwitjahyono, 2017)

Data hasil sensus ekonomi 2016 yang telah diolah di atas menunjukkan bahwasannya distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha sesuai dengan jumlah usaha/perusahaan yakni diungguli oleh sektor perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dari sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sendiri didominasi oleh usaha mikro kecil, sebanyak 20 juta orang merupakan tenaga kerja yang telah diserap oleh UMKM. Kemudian disusul lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,75 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,97 persen dan selebihnya sebesar 33,47 persen merupakan lapangan usaha yang lain. Dari sekian lapangan usaha, tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Tabel 5. Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Pulau Tahun 2016

Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Sumatera	10.202.866	2.190.543	12.402.409	17,64
Jawa	32.356.833	12.215.111	44.571.944	63,38
Bali dan Nusa Tenggara	3.126.347	551.231	3.677.578	5,23
Kalimantan	2.771.636	872.216	3.643.852	5,18
Sulawesi	4.194.144	604.686	4.798.830	6,82
Maluku dan Papua	989.698	236.155	1.225.853	1,74
Jumlah	53.641.524	16.678.942	70.320.466	100,00
	(76,28)	(23,72)	(100,00)	

(Dwitjahyono, 2017)

Menurut data di atas Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki tenaga kerja terbanyak, sebanyak 32,35 juta orang atau 63,38 persen tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera 17,64%, Pulau Sulawesi 6,82%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,23%, Pulau Kalimantan 5,18% dan terakhir Pulau Maluku dan Papua 1,74%.

Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan pemerintah, sehingga perusahaan banyak didirikan di Pulau Jawa yang mengakibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi dengan pulau-pulau lain. Adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat berjalan secara efektif. Selain itu kurangnya kualitas tenaga kerja di Indonesia menyebabkan hasil produksi yang cenderung buruk. Hal ini sesuai dengan teori klasik Adam Smith yang beranggapan bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berawal dari alokasi sumber daya manusia yang efektif. Dengan adanya pemerataan pembangunan dan pelatihan skill bagi tenaga kerja maka dapat memperbaiki dan meningkatkan proses produksi.

Pemerintah tidak dapat memuaskan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia harus dibantu oleh UMKM, dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia tentunya

kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dapat dicapai dengan cepat. Serta untuk menghadapi adanya bonus demografi di masa mendatang pemerintah perlu memperbaiki dan mengembangkan sektor UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yaitu: (Putra, 2016)

1. Strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat.
2. Perlu adanya peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif, karena produktivitas yang rendah disebabkan oleh terbatasnya akses untuk dumber daya produktif.
3. Mengembangkan kewirausahaan serta daya saing KUMKM, karena kewirausahaan menjadi factor utama dalam peningkatan daya saing ekonomi pada tingkat nasional.
4. Perbaikan pada badan koperasi, karena untuk mewujudkan demokrasi ekonomi maka perlu dilakukan pengembangan koperasi sesuai jadi dirinya.
5. Mengembangkan serta memberdayakan usaha mikro. Sebanyak 96% pelaku usaha terbesar di Indonesia merupakan usaha mikro, dimana rata-rata mereka bekerja pada sektor informal dan berpenghasilan rendah.
6. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

KUMKM; peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM dan pengembangan kelembagaan UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi nasional dapat dilihat dari 5 sisi : (Kementrian Koperasi UMKM, 2005).

1. Di berbagai sektor kedudukan UMKM harus berada di tingkat paling atas, dengan kata lain harus mengungguli diantara sektor lain.
2. UMKM harus menjadi wadah penyerapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia.
3. Mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
4. Terus berinovasi sebagai sektor yang menciptakan pasar baru
5. UMKM harus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perdagangan Internasional berupa ekspor.

Menurut data BPS (2016) usaha mikro kecil (UMK) lebih mendominasi perusahaan dibandingkan usaha menengah besar (UMB) dari semua jenis lapangan usaha. Pada skala usaha mikro kecil (UMK) lapangan usaha industry pengelolaan dengan jumlah 4,37 juta unit, 12,15 juta unit diraih oleh sektor perdagangan besar dan ecer, lalu diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan jumlah 4,44 juta perusahaan/usaha.

Distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha diungguli oleh sektor perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dari sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sendiri didominasi oleh usaha mikro kecil, sebanyak 20 juta orang merupakan tenaga kerja yang telah diserap oleh UMKM. Kemudian

disusul lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,75 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,97 persen dan selebihnya sebesar 33,47 persen merupakan lapangan usaha yang lain. Dari sekian lapangan usaha, tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Saran

Karena melihat potensi UMKM yang sangat besar terhadap Indonesia, maka kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan perlu mengembangkan lagi UMKM untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kepada masyarakat agar giat mengikuti pelatihan kerja yang telah diberikan oleh pemerintah agar meningkatkan skill dan memiliki kualitas yang tinggi. Perlu adanya pemertaan pembangunan, agar UMKM tidak berpusat di Pulau Jawa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS. (2015). <https://www.bps.go.id/>
- [2] Dongoran, F. R., Nisa, K., Sihombing, M., & Purba, L. D. (2016). Analisis Jumlah Pengangguran Dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan. *Jurnal EduTech*, 2(2), 59–70.
- [3] Dwitjahyono, A. (2017). *Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*.
- [4] Hafni, R., & Rozali, A. (n.d.). *Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*.
- [5] Hasan, & Iqbal, M. (2009). *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*.
- [6] Kementerian Koperasi UMKM. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- [7] Kuncoro, M., & At. (2010). *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*.
- [8] Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- [9] Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2).
- [10] Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.
- [11] Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52.
- [12] Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 109–115.
- [13] Sarwono, H. A. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)*.
- [14] Solikatun, S., Masruroh, Y., & Saheb. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- [15] Sumarsono, S. (2003). Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. *Jurnal Analisis Sosial*, 7(1), 77.